

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PROBOLINGGO**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program kegiatan yang menjadi urusan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada **Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025** tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra akan memuat isu-isu strategis terbaru, arah kebijakan, sasaran dan strategi pembangunan yang disertai dengan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan oleh tim penyusun RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dengan melaksanakan koordinasi bersama Perangkat Daerah lain terkait dan stakeholder terkait bidang Lingkungan Hidup.

Probolingo, 29 September 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PROBOLINGGO**



AGUS BUDIANTO, ST, M.Si
NIP. 19721209 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ivi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas LH.....	10
b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas LH.....	11
b.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	11
b.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan	12
b.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional.....	13
c. Tugas dan Fungsi Bidang Penataan Lingkungan Hidup.....	13
d. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Persampahan.....	14
e. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan.....	16
f. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	19
g. Kelompok Jabatan Fungsional.....	22
h. UPT.....	23
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	23
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana DLH.....	27

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DLH.....	31
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	48
2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	53
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	55
3.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	55
3.2 Sasaran Perangkat Daerah	56
3.3 Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah.....	57
3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	64
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
4.1 Uraian Program	66
4.2 Uraian Kegiatan	73
4.3 Uraian Sub kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif	95
4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	121
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup	126
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	130
BAB V PENUTUP.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.1 Klasifikasi Pendidikan Pegawai DLH.....	24
Tabel 2.2.1.2 Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional LH.....	24
Tabel 2.2.1.3 Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.....	25
Tabel 2.2.1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	26
Tabel 2.2.2.1 Rekap Aset DLH.....	27
Tabel 2.2.2.2 Sarana Mobilitas	27
Tabel 2.2.2.3 Peralatan Laboratorium	28
Tabel 2.2.2.4 Peralatan Lapangan	30
Tabel 2.2.2.5 Peralatan Kantor	31
Tabel 2.3.1 Tindak Lanjut Pengaduan	32
Tabel 2.3.2 Rekomendasi izin Lingkungan	33
Tabel 2.3.3 Data Pengangkutan Sampah	34
Tabel 2.3.4 Data Layanan Perempesan Pohon	35
Tabel 2.3.5 Data Izin Pemakaian RTH Kota Kraksaan	37
Tabel 2.3.6 Data Jumlah Pelanggan Laboratorium Lingkungan	40
Tabel 2.3.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kab. Prob	44
Tabel 2.3.8 Anggaran dan realisasi Pendanaan pelayanan PD	46
Tabel 2.5.1 Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis.....	52
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran RPJMD dan Perangkat Daerah	57
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD.....	58
Tabel 3.3b Definisi operasional, formulasi perhitungan IKU DLH Tahun 2025-2029.....	59
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	63
Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	64

Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah.....	69
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra PD.....	75
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.....	96
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program prioritas pembangunan Daerah rancangan akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Probolinggo.....	122
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Daerah Kab Probolinggo.....	129
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Daerah.....	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi DLH Kabupaten Probolinggo.....	10
Gambar 4.1 Asta Cita Nasional 2025-2029	124
Gambar 4.2 17 Program prioritas presiden 2025-2029.....	125



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Inmendagri nomor 2 tahun 2025, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, yaitu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, serta program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Daerah. Renstra Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo yang berkaitan dengan urusan bidang lingkungan hidup.

Dalam menyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029, terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan



penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang diawali dengan penyiapan data dan bahan, pertemuan dan pembahasan Kepala Dinas dan seluruh jajarannya, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pendampingan BAPELITBANGDA, serta Verifikasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo dan juga BAPELITBANGDA hingga didapatkan Rancangan Akhir RENSTRA.

Dalam menentukan permasalahan, isu strategis, arah kebijakan, termasuk menentukan program prioritas, RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada telaahan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Diantaranya adalah RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025-2029, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



11. Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja UU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana



Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 Tahun 2025 tentang Stautus dan Kondilis Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 nomor 2 seri D);
26. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045;



28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;



6. Mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
3. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum



- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedang uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

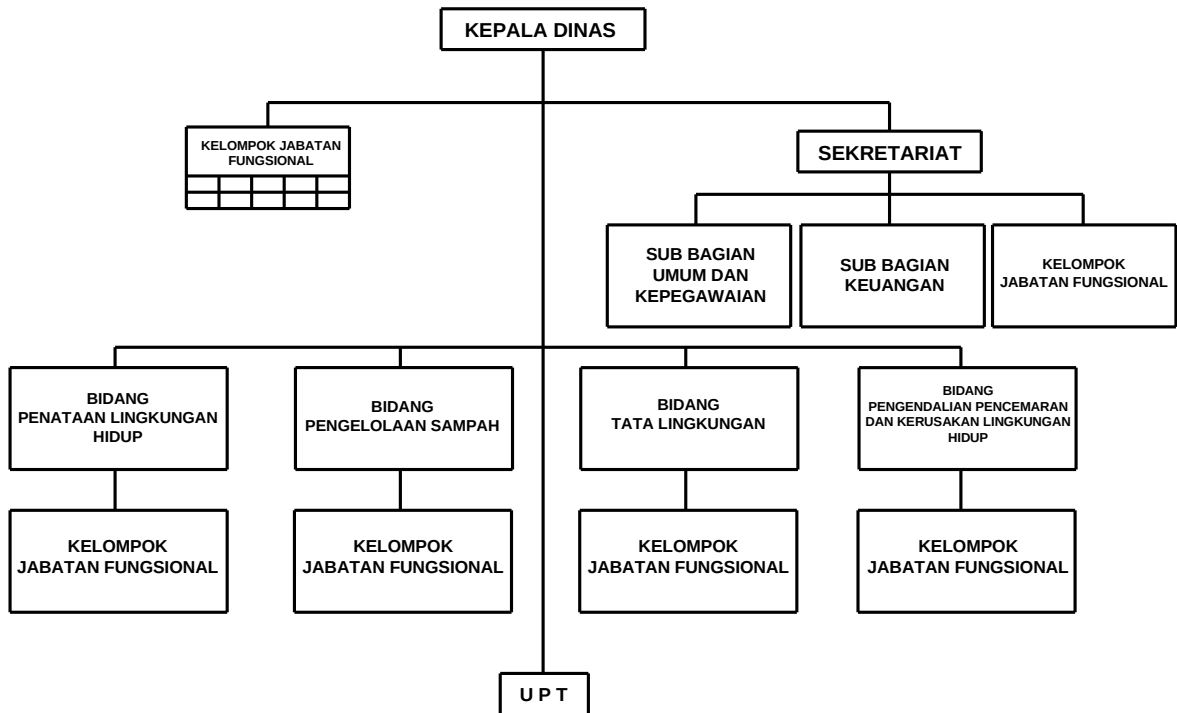
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
5. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati



melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Probolinggo

A. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan administrasi;
 - e. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



B. Sekretaris Dinas

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem pengendalian Intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
 - e. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah/negara, kearsipan dan dokumentasi;
 - f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

B.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang umum dan



kepegawaian;

- b. Pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- c. Penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. Penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
- e. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
 - d. Penyiapan bahan verifikasi dan pembukaan;
 - e. Penyusunan bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.



B.3 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (1) huruf b angka 3 adalah Jabatan fungsional perencana yang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup

(1) Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan penanganan pengaduan lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program Penaatan Lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Lingkungan Hidup);
- c. Penyelenggaraan penilaian, pemeriksaan dan persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL);
- d. Pelaksanaan fasilitasi penilaian, pemeriksaan dan persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL) bagi usaha mikro dan kecil;
- e. Penyelenggaraan penerbitan persetujuan lingkungan;
- f. Penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan



penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam persetujuan lingkungan;

- g. Pelaksanaan pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan monitoring pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam persetujuan lingkungan;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam persetujuan lingkungan;
- j. Penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- k. Pelaksanaan penerimaan pengaduan lingkungan hidup;
- l. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi pengaduan;
- m. Pelaksanaan bahan sosialisasi tata cara pengaduan lingkungan hidup;
- n. Penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Satuan kerja /unit kerja dan instansi terkait dalam penanganan pengaduan;
- o. Penyelenggaraan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- p. Penyelenggaraan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- q. Penerimaan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Hidup;
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kerja Bidang Pengelolaan Sampah;
 - b. Penyusunan informasi pengelolaan sampah;
 - c. Penyusunan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap tahun;
 - d. Perumusan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah ;
 - e. Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - f. Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - g. Pelaksanaan pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - h. Penyusunan lokasi untuk tempat pengelolaan sampah (menggunakan ulang, mengurangi dan mendaur ulang), pusat daur ulang dan fasilitasi pengurangan sampah lainnya;
 - i. Pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan/industri daur ulang sampah;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi perizinan pengelolaan sampah;
 - k. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (non pemerintah);
 - l. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (non pemerintah);
 - m. Pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah;
 - n. Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi terkait kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - o. Pelaksanaan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah;
 - p. Penyusunan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah terpadu, tempat pembuangan akhir sampah dan fasilitasi penanganan sampah lainnya;
 - q. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat penanganan sampah;



- r. Pelaksanaan penyiraman jalan akses masuk tempat pemrosesan sampah sebagai dampak kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- s. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- t. Pelaksanaan penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Pelaksanaan koordinasi pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- v. Pengelolaan bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional pengelolaan sampah;
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

E. Kepala Bidang Tata Lingkungan

- (1) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan Lingkungan Hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, peningkatan pendidikan pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup serta pengelolaan keanekaragaman hayati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kerja Bidang Tata Lingkungan;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam
 - c. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam penyusunan tata ruang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan RPJMD;
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



- f. Penyusunan bahan Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- h. Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- k. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- l. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- m. Pengelolaan website dan database dibidang lingkungan hidup;
- n. Penyusunan bahan kebijakan peningkatan kapasitas dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. Pelaksanaan Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pelaksanaan koordinasi, komunikasi dialogis/wawancara dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan pemangku kearifan lokal;
- p. Pelaksanakan pembentukan tim independen inventarisasi, verifikasi dan validasi pengakuan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;
- q. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- r. Pemberdayaan, pendampingan dan penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan



tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

- s. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan, pendampingan dan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- t. Pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan, pendampingan dan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- u. Pengembangan materi dan media penyuluhan Lingkungan Hidup;
- v. Pengembangan metode penyuluhan Lingkungan Hidup;
- w. Pengembangan kelembagaan lembaga/kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- x. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat bagi lembaga/kelompok masyarakat;
- y. Pelaksanaan fasilitasi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- z. Pembinaan dan pengembangan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan
- aa. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten;
- bb. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
- cc. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan tingkat kabupaten;
- dd. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- ee. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan keanekaragaman hayati;
- ff. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Flora Fauna);



- gg. Penyelenggaraan pengembangan dan pemeliharaan RTH dan keanekaragaman hayati;
- hh. Pengukuran Index Kualitas Lahan (IKL);
- ii. Ppenyusunan Profil Tahunan RTH dan Kehati;
- jj. Penyusunan pemeliharaan, perawatan dan penataan Hutan Kota, satwa dan Taman Kota;
- kk. Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan Penataan Hutan Kota, satwa dan Taman Kota;
- ll. Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan, perawatan dan penataan Hutan Kota dan Taman Kota (kendaraan roda empat, roda tiga, serta alat kebersihan habis pakai);
- mm. Penerbitan rekomendasi ijin penebangan dan perempasan pohon area Kota Kraksaan;
- nn. Pembudidayaan Bibit Tanaman;
- oo. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi data pengawasan lapangan petugas pertamanan;
- pp. Pelaksanaan kebersihan jalan, taman, trotoar dan drainase;
- qq. Pemeliharaan, perawatan dan operasional peningkatan kebersihan;
- rr. Pengelolaan bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional kebersihan;
- ss. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Tata Lingkungan;
- tt. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

F. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pengendalian B3 dan limbah B3.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pengendalian, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pengelolaan limbah B3;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan kualitas lingkungan;
 - d. Penyelenggaraan peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana pemantauan kualitas lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, udara dan pengelolaan limbah B3;
 - f. Pelaksanaan pengendalian gas emisi rumah kaca;
 - g. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - h. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan pengembangan sistem informasi Gas Rumah Kaca;
 - i. Penyelenggaraan program kampung iklim;
 - j. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terhadap media air, udara, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari sumber institusi dan non institusi;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan bagi pelaku usaha, kelompok masyarakat, instansi pemerintah/non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial;
 - l. Pengembangan sistem informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat melalui media elektronik, papan pengumuman, pamflet, dan sarana komunikasi lainnya;



- m. Pengembangan pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penghentian sumber pencemar dari institusi dan non institusi;
- n. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui kegiatan konservasi tanah dan air baik secara vegetatif maupun konstruktif;
- p. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penghentian sumber pencemar;
- q. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembersihan unsur pencemar bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran;
- r. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi remediasi, rehabilitasi dan restorasi bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- s. Pelaksanaan kegiatan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi dan restorasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan jika sumber pencemar tidak diketahui dan/atau pihak yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak diketahui;
- t. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- u. Pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan penyediaan bibit tanaman dan koordinasi penyediaan lahan;
- v. Pelaksanaan pemetaan dan inventarisasi dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- w. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



G. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator.
- (4) Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas.

Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.



- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. UPT

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (1) huruf h, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan berbagai sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih operasional maupun sarana dan prasarana. Seiring dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka juga diperlukan sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melakukan tugas dan fungsinya selama tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 91 karyawan/karyawati dengan status PNS, 6 tenaga PPPK, 162 tenaga honorer, dan 13 orang outsourcing.



Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (PNS) dapat ditinjau dari klasifikasi pendidikan formal sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1
Klasifikasi pendidikan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	SD	2 orang
2	SMP	3 orang
3.	SLTA	40 orang
4.	Diploma 1	0 orang
5.	Akademi/ Diploma D3	3 Orang
6.	S1	33 Orang
7.	S2	16 Orang
JUMLAH		97 ORANG

Sumber : Subag Kepegawaian DLH, 2025

Adapun pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional lingkungan hidup sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.2
Pegawai yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan teknis fungsional lingkungan hidup

NO.	KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	AMDAL A	1 Orang
2	AMDAL B	1 Orang
3.	AMDAL Penilai	3 Orang
4.	PPNS Bidang LH	2 Orang
5.	PPNS Umum	2 Orang
6.	Pengendalian Pencemaran	5 Orang
7.	Inspektur Lingkungan/PPLH	3 Orang
8.	Kebijakan Pengendali Lingkungan	2 Orang



NO.	KEPEGAWAIAN	JUMLAH
9.	Pertambangan	1 Orang
10.	Pengelolaan Lingkungan	4 Orang
11.	Penanganan Limbah B3	2 Orang
12.	Pembinaan Teknik Operasi dan	1 Orang
13.	Pemeliharaan TPA	2 Orang
14.	Penyusunan dokumen UKL/UPL	1 Orang
15.	Penataan Lingkungan	1 Orang
16.	Dasar-dasar Laboratorium Lingkungan	1 Orang
17.	Penilai AMDAL	3 Orang
18.	Audit Internal SNI ISO/IEC17025:2017 Berbasis SNI ISO 19011:2018	2 Orang
19.	Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Limbah Cair	3 Orang
JUMLAH		40 ORANG

Sumber : Subag Kepegawaian DLH, 2025

Tabel 2.2.1.3

Pegawai yang telah mengikuti diklat struktural

NO.	KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Diklat PIM IV	12 Orang
2	Diklat PIM III	3 Orang
3.	Diklat PIM II	1 Orang
JUMLAH		16 ORANG

Sumber : Subag Kepegawaian DLH, 2025



Tabel 2.2.1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO.	BIDANG	Gol I	Gol I PPPK	Gol II	Gol III	Gol III PPPK	Gol IV	JUMLAH
1	Kepala						1	1 org
2	Sekretariat		1	2	5	2	1	11 org
3	Bidang Tata Lingkungan	1		25	10		3	39 Org
4	Bidang Pengelolaan Persampahan			16	11			27 org
5	Bidang Penataan lingkungan				4	2	1	7 org
6	Bidang Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan				6		3	9 org
7	Upt Laboratorium Lingkungan				2	1		3 org
JUMLAH		1	1	43	38	5	9	97 ORANG

Sumber : Subag Kepegawaian DLH, 2025



2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mendukung tugas-tugas personil dari Dinas Lingkungan Hidup dilengkapi oleh prasarana dan sarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1
Rekap ASET Dinas Lingkungan Hidup TA 2024

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP.000)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP.000)		Ket
		Unit	Rp.(000)		Unit	Rp.(000)	
1	KIB A	11	7.023.764				
2	KIB B	1723	27.452.967.840,76				
3	KIB C	153	45.214.186.078,61				
4	KIB D	207	10.903.714.948,99				
5	KIB E	437	129.428.625				
6	KIB F	0	0	KDP	0	0	Penghapusan

sumber : Pengurus Barang , 2024

Untuk rinciannya bisa dilihat dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 2.2.2.2
Sarana Mobilitas

NO.	PERLENGKAPAN/ MOBILITAS	JUMLAH
1	Kendaraan penumpang	9 unit
2	Kendaraan roda 3	29 unit
3.	Kendaraan Tangki Air	2 unit
4.	Kendaraan Sky Walker	1 unit
5.	Kendaraan Dump Truk	10 unit
6.	Kendaraan Amrol	10 unit
7.	Mobil laboratorium	1 unit
8.	Sepeda motor	12 unit
9.	Bulldozer	1 unit



NO.	PERLENGKAPAN/ MOBILITAS	JUMLAH
10.	Bego / excavator	1 unit
11	Loader/Mini loader	2 unit
JUMLAH		78 unit

sumber : Pengurus Barang , 2025

Tabel 2.2.2.3
Peralatan Laboratorium:

NO.	PERALATAN LABORATORIUM	JUMLAH
1	Spectrophotometer	1 Unit
2	Water Purifier	1 Unit
3.	Oven	2 Unit
4.	Timbangan Analitik	2 Unit
5.	Bak Aerasi	1 Unit
6.	Meja Desikator	1 Unit
7.	Rak Tabung Reaksi	2 Unit
8.	Filter Flash	2 Unit
9.	Heater And stirrer	2 Unit
10.	Almari Bahan	1 Unit
11.	Meja Tahan Getar	1 Unit
12.	Turbidity Meter	1 Unit
13.	Statif and Klem	2 Unit
14.	Soil Tester	1 Unit
15.	Flow Meter	2 Unit
16.	Cool Box 35 L	1 Buah
17.	Kulkas Showcase 1 Pintu	1 Unit
18.	Desikator + Plate	3 Unit
19.	Penangas / Water Bath	2 Unit
20.	Alat Distilasi Borosilikat	1 Unit
21.	Almari Asam	2 Unit



NO.	PERALATAN LABORATORIUM	JUMLAH
22.	Rak Corong Pemisah	1 Unit
23.	Rotary Destilasi Evaporator	1 Unit
24.	BOD Inkubator / Termostat Cabinet	2 Unit
25.	COD Reaktor	2 Unit
26.	Klorin Meter	1 Unit
27.	Buret Digital	2 Unit
28.	Digital Electric Pipet	2 Unit
29.	Kulkas Showcase 2 Pintu	1 Unit
30.	PH Meter Portable	3 Unit
31.	Pipet Digital 10 ml /Mikropipet	3 Unit
32.	Water Sampler	1 Unit
33.	Water Depth Meter	1 Unit
34.	Pipet	11 Buah
35.	Gelas Ukur	6 Buah
36.	Beaker Glass	18 Buah
37.	Botol Reagent	4 Buah
38.	Botol Winkler 250 ml	15 Buah
39.	Botol Winkler 100 ml	10 Buah
40.	Erlemeyer 25 ml	2 Buah
41.	Erlenmeyer 50 ml	2 Buah
42.	Erlenmeyer 100 ml	5 Buah
43.	Erlenmeyer 250 ml	8 Buah
44.	Erlenmeyer 2000 ml	1 Buah
45.	Labu Ukur 157 ml	2 Buah
46.	Labu Ukur 428 ml	2 Buah
47.	Labu Ukur 100 ml	8 Buah
48.	Labu Ukur 250 ml	2 Buah
49.	Labu Ukur 1000 ml	6 Buah
50.	Spatula	4 Buah
51.	Corong	6 Buah
52.	Ball Pipet	4 Buah
53.	Cawan	23 Buah
54.	Kaca Arloji	3 Buah



NO.	PERALATAN LABORATORIUM	JUMLAH
55.	Vacum Destilator	1 Unit
56.	Coloni Counter	1 Unit
57.	Thermostat cabinet	1 Unit
58.	Timba Kasela	1 Buah
59.	Autoclaf	1 unit
60.	Digital biuret	1 Unit
61.	Portable combustion analyzer	1 Unit
62.	Salinitas	1 Unit
63.	GPS	1 Unit
JUMLAH		155 buah/ unit

sumber : Pengurus Barang , 2025

Tabel 2.2.2.4
Peralatan Lapangan:

NO.	PERALATAN LABORATORIUM	JUMLAH
1.	Soil Tester	1 Unit
2.	Flow Meter	2 Unit
3.	Cool Box 35 L	1 Buah
4.	Klorin Meter	1 Unit
5.	PH Meter Portable	3 Unit
6.	Water Sampler	1 Unit
7.	Water Depth Meter	1 Unit
8.	Timba Kasela	1 Buah
9.	Portable combustion analyzer	1 Unit
10.	Salinitas	1 Unit
11.	GPS	1 Unit
JUMLAH		14 buah/ unit

sumber : Pengurus Barang , 2025



Tabel 2.2.2.5

Peralatan Kantor:

NO.	PERALATAN KANTOR	JUMLAH
1	KOMPUTER	36 Unit
2	LAPTOP/ NOTEBOOK	42 Unit
3	LCD	2 Unit
4	PRINTER	44 Unit
5	AC	15 Unit
6	Scanner	2 Unit
7	Kamera	6 Unit
8	Drone	1 Unit
JUMLAH		148 Unit

sumber : Pengurus Barang , 2025

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup membantu Bupati melaksanakan tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan memberikan berbagai jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain sebagai berikut:

a. Layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup

Seiring dengan perkembangan kegiatan/usaha industri yang semakin meningkat, berbagai kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan kerap kali muncul secara bersamaan. Kegiatan/usaha industri pada umumnya berlokasi di sekitar kawasan permukiman penduduk berpotensi menimbulkan permasalahan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan mediator untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai kasus permasalahan bilamana terjadi pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.



Tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur hukum dan jalur musyawarah diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Namun hal terpenting dari adanya pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup adalah penghentian sumber pencemaran dan upaya pemulihan daerah tercemar dengan memperhitungkan tingkat kerugian.

Dalam pelaksanaan layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup, kinerja yang diperoleh antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Tindak lanjut pengaduan

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengaduan masyarakat yang masuk	20	7	14	14	21	15	22
2	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	20	7	14	14	21	15	22

Sumber : Bidang Penataan Lingkungan Hidup, 2025

b. Layanan Fasilitasi Persetujuan Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Probolinggo memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah melalui penciptaan iklim investasi yang sehat, cepat, dan berdaya saing. Upaya ini diwujudkan dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, penyederhanaan prosedur pelayanan publik, serta penyediaan sarana pelayanan yang terintegrasi untuk mendukung kemudahan berusaha. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penyelenggaraan **pelayanan perizinan berusaha melalui Mall Pelayanan Publik (MPP)**. Kehadiran MPP menjadi wujud nyata transformasi pelayanan publik, dimana berbagai jenis layanan perizinan dari instansi pemerintah pusat maupun daerah disatukan dalam satu tempat, salah satunya adalah Persetujuan Lingkungan yang merupakan salah satu syarat diterbitkannya Perizinan Berusaha.



Persetujuan Lingkungan merupakan instrumen penting yang memastikan setiap rencana usaha dan/atau kegiatan telah melalui proses kajian dampak lingkungan, baik melalui dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, serta memastikan pemenuhan mutu lingkungan baik itu air limbah dan emisi bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkannya. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup hadir dan memiliki peran dalam memfasilitasi pemenuhan kewajiban persetujuan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan dalam bentuk kegiatan pemeriksaan, penilaian substansi dan pembinaan. Sehingga, selain menciptakan ekosistem investasi yang kondusif dan mendukung peningkatan daya saing daerah, juga memastikan keberlanjutan dan kepastian hukum dalam pembangunan daerah tetap terjaga.

Dalam pelaksanaan layanan fasilitasi persetujuan lingkungan, kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.3.2
Rekomendasi izin lingkungan

NO	TAHUN	JUMLAH REKOMENDASI
1	2015	0 rekomendasi
2	2016	7 rekomendasi
3	2017	6 rekomendasi
4	2018	21 rekomendasi
5	2019	51 rekomendasi
6	2020	66 rekomendasi
7	2021	40 rekomendasi
8	2022	12 rekomendasi
9	2023	10 rekomendasi
10	2024	10 rekomendasi

Sumber : Bidang Penataan Lingkungan Hidup, 2025



c. Layanan pengangkutan sampah

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan layanan pengangkutan sampah di Kabupaten Probolinggo. Pelayanan pengangkutan sampah yang diselenggarakan terbagi menjadi dua jenis layanan, yakni pengangkutan sampah komersil (desa/lembaga/kegiatan/usaha) dan non-komersil (tempat ibadah). Sampah yang berasal dari sumber timbulan dikumpulkan di tempat pengumpulan sementara baik berupa bangunan TPS maupun kontainer sampah, yang selanjutnya akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk diproses. Idealnya sampah-sampah sebelum dibuang ke TPS/kontainer tersebut harus dipilah terlebih dulu dengan memanfaatkan prinsip 3 R (reduce, reuse, and recycle) sehingga menghasilkan produk sampah yang sudah terpilah dan sampah residu (sisa). Sampah residu inilah nanti yang akan diangkut ke TPA untuk dilakukan proses selanjutnya.

Dalam pelaksanaan layanan pengangkutan sampah, kinerja yang diperoleh angka sebagai berikut:

Tabel 2.3.3
Data Pengangkutan Sampah

NO	TAHUN	JUMLAH SAMPAH TERANGKUT
1	2018	13.422.727 kg
2	2019	13.990.980 kg
3	2020	14.981.856 kg
4	2021	17.521.185 kg
5	2022	17.518.640 kg
6	2023	15.491.681 kg
7	2024	14.708.940 kg

Sumber : Bidang Persampahan , 2025

**d. Layanan Bidang Tata Lingkungan**

- Pelayanan Perampasan dan Potong Pohon : Yakni layanan untuk masyarakat dan lembaga/organisasi yang berupa merapikan, memangkas, dan memotong pohon di area sepanjang jalan dalam kota Kraksaan yang diatur dalam Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2022 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman. Contoh data perempasan pohon tahun 2024 , dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.4
Data layanan Perempasan Pohon tahun 2024

No	Unit Kerja/OPD Tempat Mengurus Layanan	Nama Layanan yang Diterima	Tanggal, Bulan, Tahun Mengurus Layanan	Nama Pemohon
1	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempasan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 28 Desember 2023	Siful Riady
2	KANTOR DLH KRAKSAAN	Permohonan Penebangan Pohon	Kraksaan, 04 Januari 2024	Wisnu Wardana, SH. S.I.K /Kepala Kepolisian Resor
3	KANTOR DLH KRAKSAAN	Permohonan Penebangan Pohon	Kraksaan, 29 Januari 2024	Dr. Tofan MDS, Sp.OT
4	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempasan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 27 Pebruari 2024	Ustad Syamssuri, S.Pd.I
5	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempasan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 01 April 2024	Muhajir
6	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempasan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 22 April 2024	Fitrotun Nufus
7	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempasan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 21 Mei 2024	Cholili, S.Pd. M.M/MINU Kraksaan
8	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempasan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 05 Mei 2024	Moh. Efendi
9	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempasan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 19 Juni 2024	Pudji Satuti / Notaris Semampir
10	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempasan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 24 Juni 2024	The Theffany
11	KANTOR DLH KRAKSAAN	Permohonan Penebangan Pohon dan Pemangkasan	Kraksaan, 20 Juni 2024	H.Sakdullah Asy'ari, BA
12	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempasan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 25 Juni 2024	Siti Maryam



No	Unit Kerja/OPD Tempat Mengurus Layanan	Nama Layanan yang Diterima	Tanggal, Bulan, Tahun Mengurus Layanan	Nama Pemohon
13	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempesan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 24 Juli 2024	Lonita Dianawati / BRI
14	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempesan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 14 November 2024	Nur Afifah
15	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempesan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 15 November 2024	Miskowati
16	KANTOR DLH KRAKSAAN	Permohonan Penebangan Pohon	Kraksaan, 18 November 2024	Jusap Rusgyanto
17	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempesan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 25 November 2024	Suprapti, S.Pd / TKN Pembina II
18	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempesan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 24 Desember 2024	Fotris Junimiati Sanjaya, S.Sos / Lurah Kraksaan Wetan
19	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempesan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 31 Desember 2024	Nuranik, S.Pd
20	KANTOR DLH KRAKSAAN	Permohonan Penebangan Pohon dan Pemangkasan	Kraksaan, 09 Januari 2025	Hakimudin
21	KANTOR DLH KRAKSAAN	Permohonan Penebangan Pohon dan Pemangkasan	Kraksaan, 14 Januari 2025	Ahmad Balyan
22	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempesan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 23 Januari 2025	Ahmad Nuril Alam, SH.M.H / Kajari
23	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempesan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 24 Januari 2025	Gede Vandana Wijaya
24	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempesan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 05 Pebruari 2025	Hapip
25	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempesan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 28 April 2025	Rifa'i
26	KANTOR DLH KRAKSAAN	Permohonan Penebangan Pohon	Kraksaan, 16 Juni 2025	Hakimudin
27	KANTOR DLH KRAKSAAN	Perempesan pohon/pemangkasan pohon	Kraksaan, 11 Agustus 2025	Maswijaya Siswa Rakhman, SH / Bawaslu
28	KANTOR DLH KRAKSAAN	Permohonan Penebangan Pohon	Kraksaan, 10 September 2025	Hari Setiawan / Proyek

Sumber : Bidang Tata Lingkungan , 2025



- Pelayanan izin pemakaian taman-taman di RTH untuk masyarakat/ lembaga /organisasi dalam menyelenggarakan aktifitas kegiatan organisasi atau sebuah event kegiatan. Izin Pemakaian dikenakan persyaratan tertentu yang ditujukan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan taman bersama, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.5
Data Izin Pemakaian RTH Kota Kraksaan tahun 2024

No	Unit Kerja/OPD Tempat Mengurus Layanan Publik	Nama Layanan yang Diterima	Tanggal, Bulan, Tahun Mengurus Layanan	Nama Pengguna Layanan
1	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 17 Januari 2024	Muhammad Yazid, M.Pd / Pemuda Ansor
2	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 06 Pebruari 2024	Ocky Pical Setyawan, S.Pd / Forum Guru Olah Raga
3	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 22 Pebruari 2024	H. Hasbullah, SH / KKRA/KKMI/KKGRA/MI
4	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 03 April 2024	Dwi Joko Nurjayadi, M.M
5	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 17 April 2024	Sofiah Hastuti, S.Pd.M.Pd / DIKDAYA
6	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 18 April 2024	Agus salim / Harjakaopro 278
7	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 19 April 2024	Ocky Pical Setyawan, S.Pd / Forum Guru Olah Raga
8	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 23 April 2024	Dwi Joko Nurjayadi, M.M
9	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 27 Mei 2024	Suryani, S.Pd / TK Binaan Bunda
10	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 28 Mei 2024	Habib Syaudi Bin Alwi Alhabsyi.I.C.M.Pd / Sholawat Shubuh
11	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 11 Juni 2024	S.Rudy Rizaldi
12	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 24 Juni 2024	Puja Kurniawan, S.STP.M.Si / Camat Kraksaan
13	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 21 Agustus 2024	Erwin Munazat / ANTV



No	Unit Kerja/OPD Tempat Mengurus Layanan Publik	Nama Layanan yang Diterima	Tanggal, Bulan, Tahun Mengurus Layanan	Nama Pengguna Layanan
14	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 26 Agustus 2024	Sigit WidaHartono,S.SIP. MM / Karang Taruna Kab
15	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 07 September 2024	Moh. Junaidi, A.S / Nurul Iman
16	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 15 September 2024	Moh. Ahsan Faradis
17	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 21 Oktober 2024	Zahraturun, S,Pd
18	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 25 Oktober 2024	H. Hasbullah, SH / KKRA/KKMI/KKGRA/MI
19	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 11 November 2024	Suryani, S.Pd / TK Binaan Bunda
20	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 11 November 2024	Fian / Prabu Fun Bike
21	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 14 November 2024	Sugito, S,Pd / Kepsek SMPN 1 Gading
22	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 21 November 2024	M.Ali Yaklu.W
23	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 24 November 2024	Dwi Joko Nurjayadi, M.M
24	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 2 Desember 2024	Sri Wahyu Utami.SKM>M.MRS
25	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 05 Desember 2024	Taufik Alami, S.Sos. M,Si
26	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 09 Desember 2024	Muh. Andi Fauzan
27	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 11 Desember 2024	Novi Diana, S.Pd
28	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 16 Desember 2024	Slamet, S>AP
29	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 02 Januari 2025	Maktoem, S.Pd / Namira
30	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 06 Januari 2025	Zulfiqor Ilmiwan
31	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 08 Januari 2025	Misnatun, M.Pd



No	Unit Kerja/OPD Tempat Mengurus Layanan Publik	Nama Layanan yang Diterima	Tanggal, Bulan, Tahun Mengurus Layanan	Nama Pengguna Layanan
32	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 16 Januari 2025	Sri Andayani
33	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 31 Januari 2025	Maktoem, S.Pd / Namira
34	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 05 Pebruari 2025	Zainuddin, SE.Sy / Yayasan Siti Chtijah
35	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 14 Pebruari 2025	Ratih Tri Andayani. A.Ma.Pd
36	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 17 Pebruari 2025	Hebdri Basuki, S.Pd
37	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 19 Pebruari 2025	Bamabang /SMPN 2 Pakuniran
38	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 20 Pebruari 2025	Luluk Farida, SS
39	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 03 Maret 2025	Emy Iwantiningsih
40	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 14 April 2025	Eka Radiana, S.Pd
41	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 28 April 2025	Moh. Junaidi, A.S / Nurul Iman
42	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Alun-alun	Kraksaan, 27 Mei 2025	H.Samsul Arifin / Bupati Cup
43	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 17 Juni 2025	Moh. Junaidi, A.S / Nurul Iman
43	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 28 Juni 2025	Mohammad Badrul Kamal / DKG Garda Bangsa
44	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian SI-Park	Kraksaan, 17 Juli 2025	H. Ahmad Sudiarto, S.Pd,MM
44	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 31 Juli 2025	Nitalia AndiniDwi M,S.Psi, Gr
45	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian SI-Park	Kraksaan, 06 Agustus 2025	Suryani, S.Pd / TK Binaan Bunda
45	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 09 Agustus 2025	Mohammad Bahrul Ulum / Pramuka
45	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Hutaka	Kraksaan, 11 Agustus 2025	Ocky Pical Setyawan, S.Pd / PGRI
46	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 01 September 2025	Dedi Mochtar



No	Unit Kerja/OPD Tempat Mengurus Layanan Publik	Nama Layanan yang Diterima	Tanggal, Bulan, Tahun Mengurus Layanan	Nama Pengguna Layanan
47	KANTOR DLH KRAKSAAN	Ijin Pemakaian Depan Stadion	Kraksaan, 08 September 2025	Khairul Anam

Sumber : Bidang Tata Lingkungan , 2025

e. Layanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan oleh **UPT Laboratorium Lingkungan**. Laboratorium ini berperan dalam pengukuran, pengujian, dan pemantauan kualitas air permukaan, air limbah dan udara ambien, baik untuk kepentingan Pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Hasil uji laboratorium digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, perencanaan program, serta mendukung kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta pemenuhan kewajiban pemantauan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan.

Tabel 2.3.6
Data Jumlah Pelanggan
Laboratorium Lingkungan

No	Tahun	Jumlah Pelanggan
1	2020	10 Pelanggan
2	2021	6 Pelanggan
3	2022	5 Pelanggan
4	2023	5 Pelanggan
5	2024	11 Pelanggan
6	2025	20 Pelanggan

Sumber : Laboratorium Lingkungan Hidup, 2025

Sedang Tabel target dan tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) Kepala Perangkat Daerah, dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.6 sebagai berikut :



Tabel 2.3.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (2020-2024)					Realisasi Capaian Tahun ke (2020-2024)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	64,42	62,64	62,70	62,75	62,86	63,4	64,17	60,38	64,14	61,56	98,42%	102,44%	96,30%	102,22%	97,93%
2	Indeks Kualitas Air	-	-	-	50,00	49,85	49,90	49,95	49,80	50	50,77	38,89	47,78	36,25	100,00%	101,85%	77,94%	95,66%	72,79%
3	Indeks Kualitas Udara	-	-	-	83,00	79,13	79,22	79,31	79,38	80,18	80,71	82,82	83,64	92,88	96,60%	102,00%	104,54%	105,46%	117,01%
4	Indeks Kualitas Lahan	-	-	-	54,84	54,11	54,11	54,12	54,75	55,38	56,58	55,79	56,15	54,82	100,98%	104,56%	103,10%	103,75%	1,001%
5	Persentase Pengelolaan Persampahan				-	-	10,00	15,00	23,00	-	-	10	19	28,90			100,00%	126,67%	125,65%



Bedasarkan pengukuran target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun terakhir (tahun 2024), capaian sebagian besar indikator kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Tahun berada diatas angka 100%, namun ada 1 indikator yang belum mencapai 100% yaitu Indkes Kualitas Air. Adapun beberapa hal yang menyebabkan tercapainya target kinerja antara lain sebagai berikut:

1. IKU mencapai target karena adanya penambahan lokasi data pemantauan udara guna menambah varian data IKU dan penurunan aktivitas transportasi di jalan raya;
2. IKA belum mencapai target karena beberapa hal, diantaranya:
 1. Waktu pelaksanaan pemantauan kualitas air yang tidak sesuai dengan rencana dimana idealnya pemantauan kualitas air dalam 1 (satu) tahun dilakukan saat musim hujan dan kemarau. Namun di Tahun 2024 seluruhnya dilakukan di musim kemarau. Hal ini terjadi karena jadwal pemantauan kualitas Air Semester I yang seharusnya dilakukan maksimal di Bulan Februari, bergeser hingga bulan April akibat kegiatan yang bersumber dari DAU Kesehatan yang belum bisa dilaksanakan. Di sisi lain, Musim hujan di awal tahun 2024 berakhir lebih cepat, sehingga sampel air di waktu musim hujan tidak mencukupi.
 2. Belum adanya sinergi yang optimal dalam pelaksanaan program Kali Bersih di Kabupaten Probolinggo.
3. IKL melebihi target karena selalu dilakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
4. Persentase pengelolaan persampahan melebihi target yang ditentukan, karena adanya perubahan metode di perhitungan dan penambahan item komponen lokasi kegiatan dalam hal pengurangan sampah yaitu pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang sampah.



Selanjutnya dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan, perlu disajikan data pendanaan program dari tahun ke tahun pada periode renstra sebelumnya. Adapun data pendanaan dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2.3.7 sebagai berikut:



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Tabel 2.3.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo (2020-2024)

Uraian Nama Program	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.174.243.200				-	3.984.062.549				-	95,44%	-	-	-	-		
Program Pengelolaan Persampahan	9.110.199.000				-	8.587.044.383				-	94,26%	-	-	-	-		
Program Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	253.043.000				-	221.599.934				-	87,57%	-	-	-	-		
Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup	1.114.355.000				-	1.051.384.285				-	94,35%	-	-	-	-		
Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	253.650.000				-	243.087.011				-	95,84%	-	-	-	-		
Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Lingkungan Hidup	900.295.000				-	762.934.900				-	84,74%	-	-	-	-		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		13.506.297.134	14.298.060.956	15.674.985.564	16.591.919.408		13.163.962.529	9.728.361.428	15.005.501.210	15.855.201.434	-	97,47%	68,04%	95,73%	95,56%		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN			30.000.000	335.000.000	60.000.000			12.755.430	331.166.600	58.879.250	-	-	42,52%	98,86%	98,13%		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		555.000.000	1.482.750.000	1.092.500.000	505.500.000		546.236.300	79.254.395	869.206.809	434.383.316	-	98,42%	5,35%	79,56%	85,93%		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		846.060.000	425.250.000	210.250.000	304.364.700		665.625.907	192.280.815	202.220.500	272.338.706	-	78,67%	45,22%	96,18%	89,48%		
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)		22.000.000	7.000.000	10.000.000	15.000.000		21.922.350	2.503.600	8.445.000	14.660.800	-	99,65%	35,77%	84,45%	97,74%		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

Uraian Nama Program	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		111.500.000	40.000.000	65.000.000	60.000.000		95.143.780	23.772.950	64.374.050	49.509.500	-	85,33%	59,43%	99,04%	82,52%		
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			20.500.000	10.000.000	1.175.000			1.370.000	9.625.000	400.000	-	-	6,68%	96,25%	34,04%		
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		50.000.000	30.000.000	45.000.000	100.000.000		49.815.900	17.563.868	41.807.000	86.407.100	-	99,63%	58,55%	92,90%	86,41%		
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		40.000.000	10.000.000	20.000.000	35.500.000		38.557.300	4.798.450	18.731.000	34.733.500	-	96,39%	47,98%	93,66%	97,84%		
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		26.500.000	23.500.000	25.000.000	15.000.000		19.242.450	11.122.400	24.506.000	14.266.000	-	72,61%	47,33%	98,02%	95,11%		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		1.708.892.250	1.771.050.000	3.311.140.000	1.957.500.000		1.498.787.990	1.377.981.626	3.290.223.671	1.809.613.736	-	87,71%	77,81%	99,37%	92,45%		
JUMLAH	15.805.785.201	16.866.249.386	18.138.110.959	20.798.875.568	19.645.959.113	14.850.113.063	16.099.294.508	11.451.764.965	19.865.806.844	18.630.393.347	93,95%	95,45%	63,14%	95,51%	94,83%		



2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup sebagian besar adalah masyarakat, namun jika dipertajam tiap bidang, dapat dituliskan sebagai berikut :

A. Bidang Pengelolaan Sampah

Terkait dengan pengangkutan sampah, sasarannya adalah masyarakat desa, kegiatan/badan usaha (seperti industri, warung, hotel, sekolah, lembaga,dll) , sedang terkait sosialisasi/pelatihan pengurangan sampah sasarannya adalah masyarakat desa (anggota PKK, karang taruna, paguyuban, dll) dan lembaga lainnya.

B. Bidang Tata Lingkungan

Terkait dengan pengelolaan Ruang terbuka Hijau, sasarannya adalah masyarakat umum, terkait Masyarakat Hukum Adat sasarannya adalah masyarakat Suku Tengger di sekitar Pegunungan Bromo, sedang terkait dengan Peningkatan kapasitas, gerakan peduli lingkungan, dan penyuluhan lingkungan sasarannya adalah lembaga masyarakat, sekolah, desa, pondok pesantren, dan pegiat lingkungan.

C. Bidang Pemaatan Lingkungan Hidup

Terkait dengan fasilitasi izin usaha dan pengawasan terhadap izin usaha, sasarannya adalah seluruh kegiatan dan/atau badan usaha yang ada di Kabupaten Probolinggo.

D. Bidang Pengendalian Pencegahan dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Terkait usaha pengendalian dan pencegahan pencemaran, sasarannya adalah masyarakat, lembaga, desa/kampung iklim, kader lingkungan, pegiat lingkungan, desa sepanjang pesisir, dan perusahaan.

Dalam memberikan pelayanan dan dalam upaya mencapai target sasaran Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa Perangkat Daerah terkait atau bisa disebut sebagai “MITRA”, diantaranya adalah :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) → dalam hal pengendalian pencegahan pencemaran



- dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melalui pelayanan penerbitan persetujuan lingkungan hidup.
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP)
 - a. Dalam hal pelayanan persampahan, DPKPP menyediakan sarana dan prasarana persampahan (bangunan);
 - b. Turut berpartisipasi dalam pengendalian pencegahan pencemaran air permukaan dari sektor aktivitas domestik (limbah domestik);
 - c. Penyediaan pedestrian pada fasilitas umum dalam rangka mendukung respon Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Indeks Kualitas Udara.
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKDAYA) → Mendorong terciptanya perilaku dan budaya lingkungan pada setiap lembaga pendidikan.
 4. Dinas Perhubungan (DISHUB) → dalam upaya pengendalian pencegahan pencemaran udara dari sektor uji emisi kendaraan (sumber bergerak) dan penataan jalur sepeda.
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) → pemeliharaan sungai dalam upaya menekan pencegahan sungai melalui larangan pembuangan sampah di sungai dan pembersihan gulma di sepanjang permukaan sungai.

2.5 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo yang memiliki tugas pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup diharapkan menjadi yang terdepan dalam mengawal pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diataranya adalah pelayanan dalam hal (1) Pengelolaan persampahan, (2) Pengendalian pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Pembinaan dan pengawasan untuk kegiatan dan atau badan usaha, dan (3) Peningkatan



kapasitas lembaga dan pemeliharaan RTH yang menjadi kewenangan dinas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo perlu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi 5 (lima) tahun mendatang.

Mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029, Isu Strategis Pembangunan di bidang lingkungan hidup adalah penguatan pondasi berbagai upaya penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dengan optimalisasi aktivitas ekonomi hijau dan biru berbasis sumberdaya lokal Kabupaten Probolinggo. Isu belum optimalisasi mitigasi dan penanganan pencemaran lingkungan maupun degradasi ekosistem lainnya, termasuk pengelolaan sampah serta sumber daya air, menjadi strategis untuk diselesaikan lima tahun mendatang, sebagaimana direkomendasikan oleh KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup, hingga saat ini belum dirilis, sehingga kami belum dapat mencantumkan telaahan isu strategis. Namun, jika merujuk pada RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dimana Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur memiliki Visi “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” maka dapat dilihat Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 yang disebut **Nawa Bhakti Satya** dan sekaligus menjadi program prioritas Jawa Timur. Dalam kaitannya dengan bidang lingkungan hidup, misi yang sesuai adalah Misi ke-7, yaitu **Jatim Lestari** (Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan).

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi di Jawa Timur, diantaranya (1) Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (2) Potensi Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup, (3) Ancaman Perubahan Iklim, dan (3) Pengelolaan Persampahan, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menetapkan isu strategisnya sebagai berikut : (1) Perubahan Iklim; (2) Penurunan kualitas lingkungan



hidup; (3) Pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; dan (4) Pengelolaan Persampahan.

Dokumen perencanaan lain, yaitu KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029, menentukan isu-isu strategi yang akan dihadapi Kabupaten Probolinggo diantaranya adalah:

- a. Pengelolaan Sampah yang Kurang Optimal;
- b. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Kurang Optimal ;
- c. Kerentanan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim ;
- d. Potensi Degradasi Ekosistem ;
- e. Tingkat Kemiskinan dan Daya Saing Daerah yang rendah;
- f. Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintah yang belum Optimal ;
- g. Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang Rendah;

Sedang berdasarkan telaahan dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2045, dimana dalam dokumen tersebut tertuang beberapa poin diantaranya :

1. Kabupaten Probolinggo memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
2. Kabupaten Probolinggo berupaya meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan;
3. Kabupaten Probolinggo memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual;
4. Kabupaten Probolinggo berkomitmen mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih;



Merujuk pada beberapa telaahan dokumen perencanaan diatas, maka identifikasi permasalahan dan perumusan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5.1 Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PERMASALAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Mendapat kewenangan dalam hal: 1. Pengelolaan sampah	- Kurangnya sarana dan prasarana persampahan yang berteknologi -- Rasio jumlah timbulan sampah yang relatif besar dibandingkan dengan sarpras persampahan yang tersedia - Kurangnya kapasitas SDM bidang pengelolaan sampah dan Pengawas lingkungan hidup - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah	Pengelolaan sampah yang kurang optimal	Tingginya jumlah sampah plastik	Banyaknya sampah seiring pertumbuhan jumlah penduduk	Kurang optimalnya pengelolaan sampah	Belum optimalnya pengelolaan sampah
2. Pengendalian pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan Pembinaan dan pengawasan untuk kegiatan dan atau badan usaha	- Rendahnya kesadaran masyarakat sehingga berperilaku merusak lingkungan - Rendahnya kualitas air permukaan dan kerusakan lahan	Pengelolaan sumber daya air yang kurang optimal	Tingginya polusi air, udara, dan lahan	Tingginya pencemaran air, udara, dan lahan	Rendahnya kualitas air permukaan dan kerusakan lahan	Masih rendahnya kualitas air permukaan
	-Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim -Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kerentanan bencana dan dampak perubahan iklim	Perubahan iklim dan lingkungan	Efek gas Rumah Kaca yang berpengaruh pada perubahan iklim	Perubahan iklim dan efek gas rumah kaca	Belum optimalnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
3. Peningkatan kapasitas lembaga dan pemeliharaan RTH yang menjadi kewenangan dinas	- Banyaknya alih fungsi lahan ke pemukiman dan industri	Potensi degradasi ekosistem	Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan	Deforestasi dan Alih Fungsi lahan dan penurunan keanekaragaman hayati	Alih fungsi lahan ke industri dan pemukiman	Belum optimalnya peningkatan tutupan vegetasi



2.6 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya dana APBD dibidang lingkungan hidup;
2. Adanya peraturan-peraturan bidang lingkungan hidup;
3. Tersedianya PPLHD dan PPNS sebagai instrument pengawasan;
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

Faktor Kelemahan :

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM dibidang teknis dan fungsional laboratorium;
2. Belum optimalnya laboratorium lingkungan ;
3. Kurangnya ketersediaan data dan informasi dibidang lingkungan hidup;
4. Jumlah sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan luas cakupan pelayanan yang harus dipenuhi;

Faktor Tantangan :

1. Semakin bertambahnya jumlah dan jenis usaha dan/atau kegiatan;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk dan dunia usaha turut serta menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan;
3. Meningkatnya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman;
4. Laju pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak sebanding dengan upaya pengendalian dan pemulihan;

Faktor Peluang :

1. Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang lingkungan hidup baik dari pemerintah pusat maupun provinsi;
2. Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan industri dan masyarakat seperti program ADIPURA, ADIWIYATA, DESA BERSERI, ECOPE SANTREN, dll ;



3. Adanya sektor Dukungan penyelenggaraan pelatihan dibidang lingkungan hidup dari KLH;
4. Adanya program CSR perusahaan yang mendukung pengelolaan lingkungan.

Dari tabel analisis permasalahan, isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah, dan juga dari faktor-faktor diatas, Dinas Lingkungan Hidup mengangkat beberapa isu strategis, antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah;
2. Masih rendahnya kualitas air permukaan ;
3. Belum optimalnya upaya mitasi dan adaptasi perubahan iklim ;
4. Belum optimalnya peningkatan tutupan vegetasi;



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah Religius serta Eksis Berdaya Saing)”***. Disini, Dinas Lingkungan Hidup berada pada visi Eksis Berdaya Saing.

“Eksis Berdaya Saing” merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan lingkungan sosial yang sehat dengan budaya yang maju dengan menggunakan cara-cara baru dan inovatif untuk perbaikan Pembangunan. Memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam setiap langkah pembangunan. Kabupaten Probolinggo memiliki daya saing yang kuat dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam keberhasilan capaian pembangunannya.

Sedang Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan, memberikan arah yang jelas, sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan dengan Pokok-pokok visi.

Dinas Lingkungan Hidup masuk dalam misi ***“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil, serta perwilayahan industri secara merata” (SAE INFRATRUKTUR)***. Berdaya saing pada visi diatas merujuk pada SAE ekonomi dan infrastrukturnya, yaitu maju secara ekonomi, didukung infrastruktur yang berkualitas, merata, serta berpijak pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.



Infrastruktur yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya. Infrastruktur yang kuat akan mempercepat respon pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan daerah seperti ketimpangan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemerataan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan lapangan kerja.

Terkait dengan visi dan misi tersebut, yang selaras dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah **Tujuan dan Sasaran Misi 4** Pemerintah Kabupaten, yaitu : **“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah”**, dengan indikator tujuannya adalah **Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**. Sedang sasaran yang sesuai adalah **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”** dengan indikator sasaran **IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)**.

Dari penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup mengambil **tujuan** yang selaras dengan salah satu sasaran tersebut, yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”** dengan indikator **IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)**

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

1 (satu) tujuan Dinas Lingkungan Hidup, dirinci dalam beberapa sasaran yaitu:

- Meningkatkan Kualitas Air, Udara, dan lahan Secara berkelanjutan
- Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah

Kesinambungan antara visi-misi, tujuan sasaran RPJMD, dan tujuan sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran RPJMD dan Perangkat Daerah

VISI : “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah Religius serta Eksis Berdaya Saing)”			
MISI IV: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil, serta perwilayahan industri secara merata” (SAE INFRATRUKTUR)			
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah”, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan lahan Secara berkelanjutan, Indikator : 1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah Indikator : Persentase Pengelolaan Sampah
			Meningkatnya akuntabilitas tata Kelola Perangkat Daerah Indikator : Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah

3.3 Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA

Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi dalam pelaksanaannya. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian dan pencegahan pencemaran air
2. Meningkatkan pengendalian dan pencegahan pencemaran udara dari sumber bergerak maupun tidak bergerak
3. Mengoptimalkan peningkatan tutupan vegetasi
4. Meningkatkan pengelolaan persampahan
5. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintah daerah



Tabel 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup											
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	61.56	74.77	74.85	74.93	75.00	75.08	75.17	
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Lahan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	36.25	74.29	74.39	74.49	74.59	74.69	74.79	
			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	54.82	67.73	67.73	67.73	67.73	67.73	67.73	
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	88.71	79.02	79.12	79.22	79.32	79.42	79.52	
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Prosentase Pengelolaan Sampah (%)	28.90	29.15	29.40	29.65	29.90	30.15	30.40	
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%)	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	



Definisi operasional dan formulasi untuk masing-masing indikator diatas, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3. b DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS	SUMBERDATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Suatu indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas lingkungan suatu wilayah berdasarkan beberapa parameter lingkungan utama	$\text{IKLH Kab/Kota} = (\text{IKA} \times 37,6\%) + (\text{IKU} \times 40,5\%) + (\text{IKL} \times 21,9\%)$ IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P2KLUH) Bidang Penataan Lingkungan Hidup (PLH) Labolatorium Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS	SUMBERDATA	PENANGGUNGJAWAB
2.	Meningkatnya Kualitas Air, udara , dan Lahan	INDEKS KUALITAS AIR	Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ IPj = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P2KLH) Bidang Penataan Lingkungan Hidup (PLH) Labolatorium Lingkungan Hidup
		INDEKS KUALITAS UDARA	Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu}-0,1)\right)$ - I_{eu} adalah rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref_{EU} dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO₂ Ref_{EU} - Baku mutu udara ambien Ref_{EU} untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan NO₂ adalah 40 µg/m³	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P2KLH) Bidang Penataan Lingkungan Hidup (PLH)



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS	SUMBERDATA	PENANGGUNGJAWAB
		INDEKS KUALITAS LAHAN	Nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.	$IKL = \frac{100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times 50)}{54,3}$ dimana, IKL = Indeks Kualitas Lahan TL = Tutupan Lahan $TL = \frac{Lh + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6 + (Larh \times 0,6))}{Lw}$ keterangan: TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan Lbh = Luas belukar di kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luas areal rehabilitasi hutan Lw = Luas wilayah kabupaten	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Bidang Tata Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P2KLH)



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS	SUMBERDATA	PENANGGUNGJAWAB
3.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah ditambah Persentase Pengurangan Sampah	$\% = \% \text{ Penanganan Sampah} + \% \text{ Pengurangan Sampah}$	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Bidang Pengelolaan Sampah Bidang Tata Lingkungan
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%)	Nilai hasil atas evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1)	$\frac{\text{Nilai AKIP Tahun N} - \text{Nilai AKIP Tahun (N-1)} \times 100\%}{\text{Nilai AKIP Tahun N}}$ Keterangan : N : Nilai AKIP tahun berjalan N-1 : Nilai AKIP Tahun sebelumnya	SAKIP	Bagian sekretariat



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, maka diperlukan perumusan penahapan pembangunan pada Renstra DLH Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan perangkat daerah yang selaras dengan penahapan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo. Penahapan pembangunan DLH Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahun	Penahapan Pembangunan RPJMD	Penahapan Pembangunan RENSTRA
2026	Penguatan pondasi layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan menuju Kabupaten probolinggo berdaya saing	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dengan memaksimalkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya peduli pelestarian lingkungan hidup dan pengelollan sampah
2027	Percepatan penguatan pondasi layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dengan penguatan kelembagaan masyarakat baik dari sisi pegiat lingkungan maupun pokmas pengelola persampahan
2028	Pemantapan pondasi infrastruktur yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih, dan akuntabel	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dengan penguatan Sumber Daya Manusia di semua bidang, baik itu tenaga teknis bidang, analis laboratorium lingkungan, maupun tenaga pengawas lingkungan
2029	Pemantapan pondasi transformasi sosial ekonomi serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dengan penguatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang lingkungan hidup dan persampahan
2030	Perwujudan percepatan transformasi sosial, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dengan memaksimalkan pelayanan pada masyarakat baik dari sisi fasilitasi, pengawasan, pengaduan, dan pengelolaan sampah



3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Guna mendukung terlaksananya strategi tersebut diatas, perlu ditetapkan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan RENSTRA 2025-2029 yang juga harus selaras dengan dokumen RPJMD 2025-2029, yaitu bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

RPJMD 2025-2029			RENSTRA 2025-2029			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah", dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Perencanaan tata ruang dengan dan peningkatan ketahanan bencana dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi dan perubahan iklim.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Lahan Secara Berkelanjutan	Meningkatkan pengendalian dan pencegahan pencemaran air	Peningkatan kesadaran stakeholder lingkungan melalui pembinaan dan monitoring terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran air
					Meningkatkan pengendalian dan pencegahan pencemaran udara dari sumber bergerak maupun tidak bergerak sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim	Peningkatan kesadaran stakeholder lingkungan melalui pembinaan dan monitoring terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran udara



RPJMD 2025-2029			RENSTRA 2025-2029			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Dukungan peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami			Mengoptimalkan peningkatan tutupan vegetasi	Peningkatan luasan ruang terbuka hijau dan konservasi lahan
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Meningkatkan pengelolaan persampahan	1. Peningkatan pelayanan persampahan 2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo menjalankan 11 (sebelas) program yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program-program tersebut diantaranya:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH;
 - a) Tujuan dari program tersebut adalah memenuhi kebutuhan penunjang operasional kantor, dari mulai belanja pegawai baik untuk ASN maupun non-ASN, penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, hingga evaluasi kinerja, pengadaan sarana prasarana kantor, serta pemeliharannya.
 - b) Sasarannya adalah karyawan dan karyawan kantor Dinas Lingkungan Hidup;
2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - a) Tujuan program ini adalah penyusunan dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup), penyusunan/pelaksanaan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) jika diperlukan;
 - b) Sasaran Dinas Lingkungan Hidup, Instansi terkait dan Stakeholder terkait;



3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP;
 - a) Tujuan program ini adalah upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran, hingga pemulihan jika terjadi kekurangan yang meliputi media air, udara, dan lahan serta operasional Laboratorium Lingkungan.
 - b) Sasaran adalah masyarakat, perusahaan, dll;
4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI);
 - a) Tujuan pemeliharaan dan penataan ruang terbuka hijau, termasuk peyediaan bibit tanaman, pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan;
 - b) Sasaran : SL-Park, Hutan Kota, Alun-Alun, Median Jalan, RTH Gelora Merdeka Kraksaan, RTH dalam Kota Kraksaan;
5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3);
 - a) Tujuan fasilitasi izin penyimpanan sementara limbah B3 ;
 - b) Sasaran : perusahaan/ faskes;
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH);
 - a) Tujuan :
 - Melakukan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban rekomendasi persetujuan lingkungan;
 - Melakukan Pembinaan dan pengawasan penataan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b) Sasaran : seluruh kegiatan dan/atau usaha yang ada di Kabupaten Probolinggo yang telah memiliki perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.



7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT;
 - a) Tujuan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan agar masyarakat lebih peduli lingkungan;
 - b) Sasaran : masyarakat, desa, sekolah, pondok pesantren, lembaga masyarakat.
8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT;
 - a) Tujuan penyelenggaraan lomba dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b) Sasaran : lembaga masyarakat, desa, sekolah, dan masyarakat.
9. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT ;
 - a) Tujuannya adalah pengembangan dan perlindungan sumber daya alam di kawasan Suku Tengger yang berada di Pegunungan Bromo.
 - b) Sasaran kecamatan Sumber dan Sukapura.
10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP;
 - a) Tujuan melakukan penanganan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b) Sasaran masyarakat.
11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - a) Tujuan meningkatkan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Mulai dari peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan pengadaan sosialisasi / pelatihan pengurangan sampah, pelayanan pengangkutan sampah, hingga pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.
 - b) Sasaran ; masyarakat, kegiatan/ badan usaha, sekolah, kelompok masyarakat, dll

Untuk penjabaran program, indikator, termasuk target dan pagu 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					19.956.955.149,74		20.179.300.000,00		20.480.700.000,00		20.899.100.000,00		21.389.500.000,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.716.955.149,74		16.902.700.000,00		17.154.600.000,00		17.504.600.000,00		17.915.000.000,00	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	78.56	78.60	78.64	16.716.955.149,74	78.68	16.902.700.000,00	78.72	17.154.600.000,00	78.76	17.504.600.000,00	78.80	17.915.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					60.000.000,00		60.700.000,00		61.700.000,00		63.000.000,00		64.500.000,00	
Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun (%)	100	100	100	60.000.000,00	100	60.700.000,00	100	61.700.000,00	100	63.000.000,00	100	64.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					825.000.000,00		834.200.000,00		846.700.000,00		864.000.000,00		884.300.000,00	
Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah lahan kritis yang terehabilitasi (Ha) (Nilai)	2	2	2	825.000.000,00	2	834.200.000,00	3	846.700.000,00	4	864.000.000,00	5	884.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Prosentase jumlah titik pantau air permukaan status mutu minimal tercemar ringan (%) (%)	40	40	40		45		50		55		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prosentase jumlah titik pantau udara ambien status mutu Baik (%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					500.000.000,00		505.600.000,00		513.200.000,00		523.700.000,00		536.000.000,00	
Meningkatnya tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan	Persentase Peningkatan tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan (%) (Aduan)	2	2	2	500.000.000,00	2	505.600.000,00	2	513.200.000,00	2	523.700.000,00	2	536.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					50.000.000,00		50.600.000,00		51.400.000,00		52.500.000,00		53.800.000,00	
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah B3 (%) (%)	8	10	10	50.000.000,00	10	50.600.000,00	10	51.400.000,00	10	52.500.000,00	10	53.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					20.000.000,00		20.300.000,00		20.700.000,00		21.200.000,00		21.700.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup	Prosentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup (%) (%)	50.6	50	51	20.000.000,00	51	20.300.000,00	52	20.700.000,00	52	21.200.000,00	53	21.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00	
Meningkatnya pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan MHA	Persentase peningkatan pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan MHA (%) (%)	4.84	4.84	4.84	10.000.000,00	4.84	10.200.000,00	4.84	10.400.000,00	4.84	10.700.000,00	4.84	11.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					300.000.000,00		303.400.000,00		308.000.000,00		314.300.000,00		321.700.000,00	
Meningkatnya lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (%) (%)	100	100	100	300.000.000,00	100	303.400.000,00	100	308.000.000,00	100	314.300.000,00	100	321.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00	
Meningkatnya lembaga/keompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	Persentase peningkatan lembaga/keompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten (%) (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.200.000,00	100	10.400.000,00	100	10.700.000,00	100	11.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00	
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan (%) (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.200.000,00	100	10.400.000,00	100	10.700.000,00	100	11.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.455.000.000,00		1.471.200.000,00		1.493.200.000,00		1.523.700.000,00		1.559.500.000,00	
Terlaksananya penanganan dampak dan pengurangan sampah	Persentase Penanganan sampah (%)	15.63	15.72	15.81	1.455.000.000,00	15.9	1.471.200.000,00	15.99	1.493.200.000,00	16.08	1.523.700.000,00	16.17	1.559.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Pengurangan sampah (%)	3.27	13.43	13.59		13.75		13.91		14.07		14.23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
TOTAL KESELURUHAN					19.956.955.149,74		20.179.300.000,00		20.480.700.000,00		20.899.100.000,00		21.389.500.000,00	



4.2 Uraian Kegiatan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program-program Dinas Lingkungan Hidup dapat dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH;

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

- a) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP;

- a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- c) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;



4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI);
 - a) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;
5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3);
 - a) Penyimpanan Sementara Limbah B3;
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH);
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT;
 - a) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT;
 - a) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
9. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT ;
 - a) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP;
 - a) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten/kota;
11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - a) Pengelolaan Sampah

Untuk penjabaran kegiatan-kegiatan dalam program, dapat dilihat dalam table berikut ini:



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup							
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Lahan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		
					Indeks Kualitas Air		
					Indeks Kualitas Lahan		
					Indeks Kualitas Udara		
		Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup			Jumlah lahan kritis yang terehabilitasi (Ha)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Prosentase jumlah titik pantau air permukaan status mutu minimal tercemar ringan (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Prosentase jumlah titik pantau udara ambien status mutu Baik (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase titik pantau air dan udara yang memenuhi baku mutu lingkungan (%)	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	2.11.03.2.01.0009 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
				Jumlah desa binaan kampung iklim	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	2.11.03.2.01.0014 - Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
				Persentase penyelesaian pengujian laboratorium lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				Jumlah perusahaan / industri non proper yang telah dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (keg)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
					luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	
			Meningkatnya tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan		Persentase Peningkatan tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase RTH kewenangan Kab/kota yang terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
					Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
			Meningkatnya lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan		Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (%)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase lembaga yang berpartisipasi dalam Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
			Tersusunnya dokumen perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase dokumen RPPLH yang disusun	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Persentase dokumen KLHS yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			Meningkatnya pengelolaan limbah B3		Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah B3 (%)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Persentase fasilitasi pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
			Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup		Prosentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha / persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
					Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2.11.06.2.01.0006 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan MHA		Persentase peningkatan pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan MHA (%)	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase pengakuan MHA /Kearifan lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya lembaga/kelompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten		Persentase peningkatan lembaga/kelompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten (%)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup yang dapat diselesaikan		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan (%)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		
					Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	2.11.10.2.01.0012 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup		
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Terlaksananya a penanganan dampak dan pengurangan sampah		Prosentase Pengelolaan Sampah			
					Persentase Penanganan sampah	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
					Persentase Pengurangan sampah	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
					Jumlah pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
						Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
						Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
						Jumlah sampah yang terdaur ulang	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
						jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
					Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah sampah yang terdaur ulang	2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah			Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD		Nilai LHE AKIP PD	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				persentase laporan realisasi PAD tersusun	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2.11.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	2.11.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.11.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Presentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Terpenuhi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



4.3 Uraian Sub kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dalam penyusunan Renstra 2025 – 2029 melaksanakan 11 Program, 21 Kegiatan dan 68 Sub kegiatan dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang diuraikan pada tabel berikut :



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				19.956.955.149,74		20.179.300.000,00		20.480.700.000,00		20.899.100.000,00		21.389.500.000,00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.716.955.149,74		16.902.700.000,00		17.154.600.000,00		17.504.600.000,00		17.915.000.000,00		
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD	78.56	78.64	16.716.955.149,74	78.68	16.902.700.000,00	78.72	17.154.600.000,00	78.76	17.504.600.000,00	78.80	17.915.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		30.000.000,00		
Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	30.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2			
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.030.000.000,74		12.213.041.585,00		12.139.941.585,00		12.489.941.585,00		12.925.341.585,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94	97	12.030.000.000,74	97	12.213.041.585,00	97	12.139.941.585,00	97	12.489.941.585,00	97	12.925.341.585,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18		18		18		18					
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.000.000.000,74		12.183.041.585,00		12.079.941.585,00		12.429.941.585,00		12.895.341.585,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94	97	12.000.000.000,74	97	12.183.041.585,00	97	12.079.941.585,00	97	12.429.941.585,00	97	12.895.341.585,00		
2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	10.000.000,00		
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	10.000.000,00	18	10.000.000,00	18	20.000.000,00	18	20.000.000,00	18	10.000.000,00		
2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				9.000.000,00		9.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		9.000.000,00		
persentase laporan realisasi PAD tersusun	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	9.000.000,00		
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0	12		12		12		12		12			
2.11.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	3.000.000,00		
2.11.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	3.000.000,00		
2.11.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	3.000.000,00		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		20.000.000,00		
Presentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	6	50.000.000,00	7	50.000.000,00	8	20.000.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000,00		20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	6	50.000.000,00	7	50.000.000,00	8	20.000.000,00		

2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				363.000.000,00		363.000.000,00		467.000.000,00		467.000.000,00		363.000.000,00		
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	363.000.000,00	12	363.000.000,00	12	467.000.000,00	12	467.000.000,00	12	363.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	2		2		2		3		3			
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	7.000.000,00		
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				85.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	85.000.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	9.000.000,00		
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				175.000.000,00		175.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	175.000.000,00	12	175.000.000,00	12	185.000.000,00	12	185.000.000,00	12	175.000.000,00		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00	4	12.000.000,00		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00		75.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	75.000.000,00		
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				55.000.000,00		55.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		55.000.000,00		
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Terpenuhi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27	28	55.000.000,00	28	55.000.000,00	28	125.000.000,00	30	125.000.000,00	30	55.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	7		10		10		10		10			



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27	28	25.000.000,00	28	25.000.000,00	28	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00		
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	7	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	30.000.000,00		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.907.908.415,00		3.907.908.415,00		3.907.908.415,00		3.907.908.415,00		4.207.908.415,00		
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	3.907.908.415,00	12	3.907.908.415,00	12	3.907.908.415,00	12	3.907.908.415,00	12	4.207.908.415,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12				12				12			
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				207.908.415,00		207.908.415,00		207.908.415,00		207.908.415,00		207.908.415,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	207.908.415,00	12	207.908.415,00	12	207.908.415,00	12	207.908.415,00	12	207.908.415,00		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.700.000.000,00		3.700.000.000,00		3.700.000.000,00		3.700.000.000,00		4.000.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	3.700.000.000,00	12	3.700.000.000,00	12	3.700.000.000,00	12	3.700.000.000,00	12	4.000.000.000,00		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				302.046.734,00		304.750.000,00		374.750.000,00		374.750.000,00		304.750.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	18	302.046.734,00	18	304.750.000,00	18	374.750.000,00	18	374.750.000,00	18	304.750.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1		1		1		1					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	21		21		21		21					
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.750.000,00		24.750.000,00		24.750.000,00		24.750.000,00		24.750.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	24.750.000,00	1	24.750.000,00	1	24.750.000,00	1	24.750.000,00	1	24.750.000,00		
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				185.000.000,00		185.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		185.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	21	185.000.000,00	21	185.000.000,00	21	200.000.000,00	21	200.000.000,00	21	185.000.000,00		
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	18	20.000.000,00	18	20.000.000,00	18	50.000.000,00	18	50.000.000,00	18	20.000.000,00		
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				72.296.734,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	72.296.734,00	2	75.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	75.000.000,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				60.000.000,00		60.700.000,00		61.700.000,00		63.000.000,00		64.500.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersusunnya dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100	100	60.000.000,00	100	60.700.000,00	100	61.700.000,00	100	63.000.000,00	100	64.500.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Persentase dokumen RPPLH yang disusun	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.700.000,00		11.700.000,00		13.000.000,00		14.500.000,00			
Persentase dokumen KLHS yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-	1	10.000.000,00	1	10.700.000,00	1	11.700.000,00	1	13.000.000,00	1	14.500.000,00			
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-	0				0				1				1
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				-		-		-		10.000.000,00		10.000.000,00			
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-	0	-	0	-	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				10.000.000,00		10.700.000,00		11.700.000,00		3.000.000,00		4.500.000,00			
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-	1	10.000.000,00	1	10.700.000,00	1	11.700.000,00	1	3.000.000,00	1	4.500.000,00			
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				825.000.000,00		834.200.000,00		846.700.000,00		864.000.000,00		884.300.000,00			



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah titik pantau udara ambien status mutu Baik (%)	100	100	825.000.000,00	100	834.200.000,00	100	846.700.000,00	100	864.000.000,00	100	884.300.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Prosentase jumlah titik pantau air permukaan status mutu minimal tercemar ringan (%)	40	40		45		50		55		60			
	Jumlah lahan kritis yang terehabilitasi (Ha)	2	2		2		3		4		5			
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				705.000.000,00		714.200.000,00		726.700.000,00		744.000.000,00		764.300.000,00		
Jumlah desa binaan kampung iklim	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	2	2	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00		
	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	2	1		1		1		1		1			
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	2	2	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
2.11.03.2.01.0014 - Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	2	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
Persentase penyelesaian pengujian labolatorium lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	60	1	335.000.000,00	1	344.200.000,00	1	356.700.000,00	1	374.000.000,00	1	394.300.000,00		
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12	12		12		12		12		12			
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	60	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				325.000.000,00		334.200.000,00		346.700.000,00		364.000.000,00		384.300.000,00		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12	12	325.000.000,00	12	334.200.000,00	12	346.700.000,00	12	364.000.000,00	12	384.300.000,00		
Persentase titik pantau air dan udara yang memenuhi baku mutu lingkungan (%)	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	30	290.000.000,00	30	290.000.000,00	30	290.000.000,00	30	290.000.000,00	30	290.000.000,00		
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	36	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-	1		1		1		1		1			



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1	1		1		1		1		1			
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00		
2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	4	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	36	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.11.03.2.01.0009 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah perusahaan / industri non proper yang telah dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5	5	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	8	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5	5	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	8	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (keg)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	7	7		8		8		9		9			
	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			
2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	7	7	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				500.000.000,00		505.600.000,00		513.200.000,00		523.700.000,00		536.000.000,00		
Meningkatnya tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan	Persentase Peningkatan tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan (%)	2	2	500.000.000,00	2	505.600.000,00	2	513.200.000,00	2	523.700.000,00	2	536.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				500.000.000,00		505.600.000,00		513.200.000,00		523.700.000,00		536.000.000,00		
Persentase RTH kewenangan Kab/kota yang terpelihara	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	500.000.000,00	1	505.600.000,00	1	513.200.000,00	1	523.700.000,00	1	536.000.000,00		
	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1		1		1							
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	70.6	70.6		70.6		70.6							
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0.5	0.5		0.5		0.5							
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				350.000.000,00		355.600.000,00		363.200.000,00		373.700.000,00		386.000.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	70.6	70.6	350.000.000,00	70.6	355.600.000,00	70.6	363.200.000,00	70.6	373.700.000,00	70.6	386.000.000,00		
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0.5	0.5	100.000.000,00	0.5	100.000.000,00	0.5	100.000.000,00	0.5	100.000.000,00	0.5	100.000.000,00		
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				50.000.000,00		50.600.000,00		51.400.000,00		52.500.000,00		53.800.000,00		
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah B3 (%)	8	10	50.000.000,00	10	50.600.000,00	10	51.400.000,00	10	52.500.000,00	10	53.800.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				50.000.000,00		50.600.000,00		51.400.000,00		52.500.000,00		53.800.000,00		
Persentase fasilitasi pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online SingleSubmission)	8	10	50.000.000,00	11	50.600.000,00	12	51.400.000,00	13	52.500.000,00	14	53.800.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online SingleSubmission)				50.000.000,00		50.600.000,00		51.400.000,00		52.500.000,00		53.800.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online SingleSubmission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online SingleSubmission)	8	10	50.000.000,00	11	50.600.000,00	12	51.400.000,00	13	52.500.000,00	14	53.800.000,00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				20.000.000,00		20.300.000,00		20.700.000,00		21.200.000,00		21.700.000,00		
Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup	Prosentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup (%)	50.6	51	20.000.000,00	51	20.300.000,00	52	20.700.000,00	52	21.200.000,00	53	21.700.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.300.000,00		20.700.000,00		21.200.000,00		21.700.000,00		
Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha / persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2	1	20.000.000,00	1	20.300.000,00	1	20.700.000,00	1	21.200.000,00	1	21.700.000,00		
	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50	10		10		10		10		10			
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	6	6		6		6		6		6			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				6.000.000,00		6.300.000,00		6.700.000,00		7.200.000,00		7.700.000,00		
Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	6	6	6.000.000,00	6	6.300.000,00	6	6.700.000,00	6	7.200.000,00	6	7.700.000,00		
2.11.06.2.01.0006 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	3	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) , KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan MHA	Persentase peningkatan pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan MHA (%)	4.84	4.84	10.000.000,00	4.84	10.200.000,00	4.84	10.400.000,00	4.84	10.700.000,00	4.84	11.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00		
Persentase pengakuan MHA /Kearifan lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	10.000.000,00	1	10.200.000,00	1	10.400.000,00	1	10.700.000,00	1	11.000.000,00		
2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	10.000.000,00	1	10.200.000,00	1	10.400.000,00	1	10.700.000,00	1	11.000.000,00		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				300.000.000,00		303.400.000,00		308.000.000,00		314.300.000,00		321.700.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (%)	100	100	300.000.000,00	100	303.400.000,00	100	308.000.000,00	100	314.300.000,00	100	321.700.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000,00		303.400.000,00		308.000.000,00		314.300.000,00		321.700.000,00		
Persentase lembaga yang berpartisipasi dalam Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100	100	300.000.000,00	100	303.400.000,00	100	308.000.000,00	100	314.300.000,00	100	321.700.000,00		
	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3	3				3				3			
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1				1				1			
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				100.000.000,00		103.400.000,00		108.000.000,00		114.300.000,00		121.700.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	100.000.000,00	1	103.400.000,00	1	108.000.000,00	1	114.300.000,00	1	121.700.000,00		
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00		
Meningkatnya lembaga/kelompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	Persentase peningkatan lembaga/kelompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten (%)	100	100	10.000.000,00	100	10.200.000,00	100	10.400.000,00	100	10.700.000,00	100	11.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00		
Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	1	10.000.000,00	1	10.200.000,00	1	10.400.000,00	1	10.700.000,00	1	11.000.000,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	1	10.000.000,00	1	10.200.000,00	1	10.400.000,00	1	10.700.000,00	1	11.000.000,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00		
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan (%)	100	100	10.000.000,00	100	10.200.000,00	100	10.400.000,00	100	10.700.000,00	100	11.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00		
Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	1	10.000.000,00	1	10.200.000,00	1	10.400.000,00	1	10.700.000,00	1	11.000.000,00		
	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	2	1				1		1		1			
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	5	2				2		2		2			
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2	1				1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkun- gan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				2.500.000,00		2.700.000,00		2.900.000,00		3.200.000,00		3.500.000,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	5	2	2.500.000,00	2	2.700.000,00	2	2.900.000,00	2	3.200.000,00	2	3.500.000,00		
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
2.11.10.2.01.0012 - Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	2	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.455.000.000,00		1.471.200.000,00		1.493.200.000,00		1.523.700.000,00		1.559.500.000,00		
Terlaksananya penanganan dampak dan pengurangan sampah	Persentase Penanganan sampah	15.63	15.81	1.455.000.000,00	15.9	1.471.200.000,00	15.99	1.493.200.000,00	16.08	1.523.700.000,00	16.17	1.559.500.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Persentase Pengurangan sampah	3.27	13.59		13.75		13.91		14.07		14.23			
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				1.455.000.000,00		1.471.200.000,00		1.493.200.000,00		1.523.700.000,00		1.559.500.000,00		
Jumlah pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	30	10	1.455.000.000,00	10	1.471.200.000,00	10	1.493.200.000,00	10	1.523.700.000,00	10	1.559.500.000,00		
	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	26567	13437		13500		13600		13700		13800			
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	0	0		0		0		0		0			
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah sampah yang terdaur ulang	22539	5771		5771		5771		5771		5771			



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	30	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00		
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				655.000.000,00		671.200.000,00		693.200.000,00		723.700.000,00		759.500.000,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	26567	13437	655.000.000,00	13500	671.200.000,00	13600	693.200.000,00	13700	723.700.000,00	13800	759.500.000,00		
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				-		-		-		-		-		
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		



RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				-		-		-		-		-		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				-		-		-		-		-		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	22539	5771	50.000.000,00	5771	50.000.000,00	5771	50.000.000,00	5771	50.000.000,00	5771	50.000.000,00		



4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Secara keseluruhan, program-program Dinas Lingkungan hidup merupakan program prioritas, karena akan selalu berkaitan satu sama lain dalam hal pencapaian target sasaran Perangkat Daerah. Namun, dalam dokumen RPJMD 2025-2029, Program Prioritas terkait lingkungan hidup lebih fokus pada pengelolaan sampah atau bisa disebut dengan istilah SAE Lingkungan, yang terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu :

1. REVITALISASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH

Memperbaiki dan mengoptimalkan pengelolaan TPA agar lebih efisien, ramah lingkungan, dan mampu mendukung system pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan yang ada di TPA (Tempat Pembuangan Akhir)

2. GUS BARKAH: MENGELOLA SAMPAH JADI BERKAH MELALUI EKONOMI SIRKULAR

Dalam ekonomi sirkular, sampah tidak hanya dibuang, tetapi didaur ulang untuk menciptakan produk baru. Program ini akan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan cara ini, sampah tidak lagi menjadi beban, melainkan berkah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan pelatihan pengurangan sampah (dalam hal ini pendauran ulang sampah) kemasyarakat secara umum, dan kelembaga masyarakat secara khusus seperti Bank Sampah, Karang Taruna, Paguyuban, dll.

Selain SAE Lingkungan yang berpusat pada Program Pengelolaan Sampah, Program lain yang menjadi prioritas Dinas Lingkungan Hidup selama 5(lima) tahun mendatang diantaranya Adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, dimana program ini merupakan program penting yang menentukan pengambilan sampel dan perhitungan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang merupakan Indeks Kinerja Utama Kepala Dinas. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, yang berperan dalam pemeliharaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan menentukan



besaran indeks kualitas lahan, juga merupakan salah satu Indeks Kinerja Utama Kepala Dinas. Serta Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang tidak kalah penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan/atau Lembaga lain untuk lebih peduli dalam pengelolaan lingkungan termasuk pengelolaan sampah.

Secara eksplisit, Program Prioritas Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN
PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup				
1.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
			2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
			2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
			2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			2.11.03.2.01.0014 - Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	
			2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
			2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	
2.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksa	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup				
3.	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
			2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
4.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan dampak dan pengurangan sampah	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
			2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	

KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Program prioritas Dinas Lingkungan Hidup selaras dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 (Astacita) Nomor 8 yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam disini memiliki maksud kehidupan seimbang dan selaras dengan alam, tanpa merusaknya. Manusia dapat menjalani kehidupannya dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, serta menjaga agar alam tetap lestari untuk generasi saat ini dan mendatang. Sesuai dengan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Seperti yang tercantum dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.1 Astacita Nasional 2025-2029



Namun, jika melihat lebih dalam kedokumen RPJMN 2025-2029, yang memuat 17 (tujuh belas) program prioritas presiden, maka yang sesuai dengan Dinas Lingkungan Hidup Adalah program ke-11, “Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup“ dengan target pembangunan berkelanjutan, percepatan net zero emisi, pengurangan jejak karbon dan air, penggunaan bioplastik. Hal ini berarti memastikan bahwa alam, sumber daya alam, dan ekosistem tetap sehat dan seimbang dengan cara menjaga, merawat, dan melindunginya dari kerusakan.

Gambar 2.5
17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Gambar 4.217 Program Prioritas Presiden 2025-2029



4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dijadikan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu parameter atau angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kebersihan atau kualitas suatu badan air (seperti sungai, danau, atau air tanah) berdasarkan sejumlah parameter kimia, fisika, dan biologi yang terukur. Indeks ini dibuat agar masyarakat, pengambil kebijakan, dan peneliti dapat dengan mudah memahami kondisi air secara umum tanpa harus membaca semua data parameter satu per satu.

Beberapa parameter umum yang digunakan untuk menghitung IKA antara lain:

- a) DO (Dissolved Oxygen) – Oksigen terlarut.
- b) BOD (Biological Oxygen Demand) – Kebutuhan oksigen biologis.
- c) COD (Chemical Oxygen Demand) – Kebutuhan oksigen kimia.
- d) TSS (Total Suspended Solid) – Padatan tersuspensi total.
- e) pH – Tingkat keasaman/alkalinitas.
- f) Nitrate (NO₃) – Kandungan nitrat.
- g) Phosphate (PO₄) – Kandungan fosfat.
- h) Fecal coliform – Bakteri indikator pencemaran tinja.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) atau dalam bahasa Inggris disebut Air Quality Index (AQI) adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kebersihan atau pencemaran udara di suatu wilayah dalam satu angka yang mudah dipahami oleh masyarakat. Memberikan informasi yang cepat dan mudah dipahami kepada publik tentang seberapa bersih atau tercemarnya udara saat ini dan apa dampaknya terhadap



Kesehatan. Indeks ini biasanya dihitung berdasarkan konsentrasi polutan utama di udara, seperti:

- a. PM 2.5 (partikel halus berukuran $\leq 2,5$ mikron)
- b. PM10 (partikel berukuran ≤ 10 mikron)
- c. **SO₂ (Sulfur dioksida)** , Gas yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil
- d. **NO₂ (Nitrogen dioksida)**, Gas dari kendaraan dan pembangkit listrik
- e. **CO (Karbon monoksida)**, Gas beracun dari pembakaran tidak sempurna
- f. **O₃ (Ozon troposferik)**, Ozon di permukaan tanah, terbentuk dari reaksi kimia gas polutan

3. Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan, kesehatan, dan produktivitas suatu lahan dalam mendukung fungsi ekologis dan/atau produksi (misalnya untuk pertanian, kehutanan, atau konservasi). IKL bertujuan untuk:

- Menilai kesuburan dan produktivitas tanah.
- Mengidentifikasi degradasi atau kerusakan lahan.
- Memberi dasar bagi pengelolaan lahan berkelanjutan.
- Membantu dalam pengambilan kebijakan tata guna lahan.

Berikut beberapa indikator atau parameter utama yang digunakan dalam penilaian kualitas lahan:

- a. Fisik (Tekstur tanah, kedalaman efektif, kemiringan lahan, drainase)
- b. Kimia (pH tanah, kandungan hara (N, P, K), C-organik, kapasitas tukar kation (KTK))
- c. Biologis (Aktivitas mikro organisme, kandungan bahan organik)
- d. Penggunaan (Pola penggunaan lahan, tingkat erosi, kerapatan vegetasi)

4. Persentase Pengelolaan Sampah

Persentase pengelolaan sampah adalah ukuran dalam bentuk persen (%) yang menunjukkan seberapa besar volume total sampah yang berhasil ditangani secara benar dan berkelanjutan, dibandingkan



dengan jumlah total sampah yang dihasilkan dalam periode tertentu (biasanya 1 tahun). Sampah yang dibuang sembarangan, dibakar liar, atau masuk TPA open dumping biasanya tidak dihitung sebagai pengelolaan yang baik. Sampah dianggap “dikelola” jika melalui proses seperti:

- a. Daur ulang (Pemilahan dan pengolahan plastik, kertas, logam)
- b. Kompos (Pengolahan sampah organik menjadi pupuk)
- c. Insejerasi terkendali (Pembakaran sampah dengan pengendalian emisi)
- d. Landfill terkontrol (Penimbunan akhir yang aman (bukan open dumping))
- e. Bank sampah dan TPS 3R (Pengelolaan berbasis masyarakat)
- f. RDF (Refuse-Derived Fuel) (Sampah jadi bahan bakar alternatif industry)

Untuk target Indeks Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup periode 2025-2029, dapat dilihat dalam table berikut :



**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup									
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	36,25	74,29	74,39	74,49	74,59	74,69	74,79	
3.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	54,82	67,73	67,73	67,73	67,73	67,73	67,73	
4.	Prosentase Pengelolaan Sampah	%	28,9	29,15	29,4	29,65	29,9	30,15	30,4	
5.	Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	%	0,1	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
6.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,71	79,02	79,12	79,22	79,32	79,42	79,52	



4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), IKK Dinas Lingkungan Hidup meliputi 3 aspek yaitu :

1. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
2. Persentase Pengelolaan Sampah
3. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup bidang lingkungan hidup.

Namun, karena IKLH merupakan salah satu IKD (Indikator Kinerja Daerah), maka yang menjadi IKK adalah turunannya, sehingga IKK Dinas Lingkungan Hidup menjadi :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
4. Persentase Pengelolaan Sampah
5. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup bidang lingkungan hidup.

Ini merupakan indikator pengawasan dan kepatuhan lingkungan hidup di tingkat daerah, yang mengevaluasi sejauh mana kegiatan dan/atau usaha dalam hal :

- a) Memiliki dan mematuhi Persetujuan lingkungan (pemenuhan komitmen pada Dokumen lingkungan),
- b) Mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (PUU LH) yang berlaku.

Untuk target Indeks Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup periode 2025-2029, dapat dilihat dalam table berikut :



TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.	Indeks Kualitas Air	positif	Indeks	36,25	74,29	74,39	74,49	74,59	74,69	74,79	
3.	Indeks Kualitas Lahan	positif	Indeks	54,82	67,73	67,73	67,73	67,73	67,73	67,73	
4.	Indeks Kualitas Udara	positif	Indeks	88,71	79,02	79,12	79,22	79,32	79,42	79,52	
5.	Prosentase Pengelolaan Sampah	positif	%	28,9	29,15	29,4	29,65	29,9	30,15	30,4	
6.	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup bidang lingkungan hidup	negatif	%	38,89	38,5	38	37,5	37	36,5	36	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berfungsi untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah pada periode lima tahun. Dalam implementasi dokumen perencanaan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian tujuan utama meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan Daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau



ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dengan demikian tujuan utama meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 – 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah yang berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Probolingo, 29 September 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PROBOLINGGO**



AGUS BUDIANTO, ST, M.Si
NIP. 19721209 200312 1 004